Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygienie Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan atau Minuman Siap Saji di Paguyuban Pedagang Car Free Day GOR Tuban Perspektif Hukum Islam dan KEPMENKES Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygienie Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

Sisi Sholekhatin Ni'mah¹, Galuh Widitya Qomaro²

Abstrak

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pedagang yang ada di car free day GOR Tuban masih ada yang tidak mencuci tangan saat menangani makanan, tidak menutup kepala/ tidak memakai topi. Pemilihan bahan pangan yang kurang baik atau tidak memenuhi standar pangan yang di tetapkan serta tidak tersedianya air bersih yang mencukupi untuk mencuci peralatan masak dan peralatan makan juga dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada produk yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan atau minuman siap saji menurut KEPMENKES Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang pedoman Persyaratan Hygienie Sanitasi Makanan Jajanan, bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan atau minuman siap saji dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap makanan atau minuman di car free day Tuban. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan di car free day GOR Tuban menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan ketentuan KEPMENKES Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang pedoman Persyaratan Hygienie Sanitasi Makanan Jajanan dan Prespektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman siap saji di paguyuban car free day GOR Tuban belum berjalan maksimal. Penjaja memahami hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha, tetapi penjaja cenderung mengabaikan dan tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap makanan atau minuman siap saji di paguyuban pedagang car free day GOR Tuban belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pemerintah kabupaten Tuban belum optimal terkait pengawasan dan hanya menerapkan sanksi teguran lisan dan tertulis, pelaksanaan pengawasan tidak secara rutin, keterbatasan anggaran yang menjadi penyebabnya.

¹ Universitas Trunojoyo Madura

² Universitas Trunojoyo Madura

Email: sisisholekhatin954@gmail.com

gwiditya@trunojoyo.ac.id

Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Makanan atau minuman siap saji, pengawasan*

Abstract

Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Some traders at the Tuban GOR car free day still don't wash their hands when handling food, don't cover their heads/don't wear hats. Selection of food ingredients that are not good or do not meet the established food standards and the unavailability of sufficient clean water to wash cooking utensils and cutlery can also cause contamination of the products produced. This study aims to find out how consumers protect fast food or drinks according to KEPMENKES Number 942/MENKES/SK/VII/2003 concerning Guidelines for Food Sanitation Hygiene Requirements for Snacks, how consumers protect fast food or drinks from the perspective of Islamic law and how to implement them. supervision of food or drink on the Tuban car free day. This research is the result of field research at the car free day GOR Tuban using descriptive qualitative methods. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation, then the results of the research would be analyzed based on the provisions of KEPMENKES Number 942/MENKES/SK/VII/2003 concerning guidelines for Food Sanitation Hygiene Requirements for Snacks and Islamic Law Perspectives. The results of this study concluded that consumer protection for ready-to-eat food and drinks at the Tuban GOR car free day association has not run optimally. Vendors understand their rights and obligations as business actors, but peddlers tend to ignore and not comply with the rules that have been set. The implementation of supervision and guidance on ready-to-eat food or drinks at the Tuban GOR car free day traders association has not fully gone well, the Tuban district government has not been optimal in terms of supervision and only applies verbal and written warning sanctions, the implementation of supervision is not routine, budget constraints have become the cause.

Keywords : *Consumer Protection, Fast Food and Drink, Supervisi*

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks seiring dengan berjalannya peningkatan kesejahteraan. Salah satu dari sekian banyaknya kebutuhan manusia adalah kebutuhan pangan atau makanan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan yaitu menjelaskan tentang higienie sanitasi, yaitu upaya mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan peralatannya yang berpotensi menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan.

Menurut pandangan Islam, para pedagang dilarang menjual makanan atau minuman yang haram. Makanan yang disajikan harus memenuhi kriteria halal dan thayib. Halal berarti makanan yang tidak dilarang oleh agama Islam, sedangkan thayib berarti makanan yang memenuhi standar gizi dan tidak membahayakan (*mudharat*). (Marta Ferry dkk, 2019)

Keputusan Menteri Kesehatan ini juga mengatur tentang sanitasi makanan, termasuk perilaku penjamah, peralatan, air, dan bahan makanan. Oleh karena itu, pedagang makanan atau minuman diharuskan menerapkan prinsip higienis untuk menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, di CFD Tuban masih terdapat pedagang yang tidak mencuci tangan saat menangani makanan dan tidak menggunakan topi pelindung. Selain itu, pemilihan bahan pangan yang kurang baik atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan juga dapat menyebabkan kontaminasi pada produk yang dihasilkan. Selain itu, ketersediaan air bersih yang cukup untuk mencuci peralatan masak dan peralatan makan juga menjadi faktor yang penting. Semua ini dapat menyebabkan pencemaran pada produk makanan yang dijual.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih dalam lagi dengan judul " Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan atau Minuman Siap Saji di Paguyuban Pedagang Car Free Day GOR Tuban Perspektif Hukum Islam dan KEPMENKES Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygienie Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK "

KAJIAN LITERATURE

Konsumen

Dalam UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diberikan definisi sebagai "setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk lainnya, dan tidak untuk perdagangan." Menurut Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan janji yang diberikan
- c. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai produk atau layanan
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait dengan barang atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan dukungan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa yang adil

Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

- f. Hak atas pembinaan dan pendidikan dalam hal konsumsi yang bertanggung jawab
- g. Hak untuk diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai dengan kesepakatan.
- i. Hak-hak ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999, konsumen memiliki kewajiban-kewajiban berikut:

- a. Melakukan pembacaan dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa.
- b. Melakukan transaksi pembelian barang dan jasa dengan itikad baik.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak kepada pelaku usaha sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang memiliki niat buruk.
- c. Hak untuk membela diri secara wajar dalam penyelesaian hukum sengketa dengan konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai niat baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang, serta memberikan garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam melindungi kepentingan para pihak dalam lalu lintas perdagangan atau berbisnis, hukum Islam telah menetapkan beberapa asas yang menjadi pedoman dalam melakukan transaksi kegiatan bisnis. yaitu *at-tauhīd*, *istiklāf*, *al-ihsān*, *al-amānah*, *ash-shiddīq*, *al-adl*, *al-khiyār*, *at-tā'wun*, keamanan, keselamatan, dan *at-tarādhīn*. Hak konsumen dalam Islam yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan keamanan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar. (Nurhalis,2015)

Kerugian yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu: (Muhammad & Alimin, 2018)

Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygienic Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

- a. Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*).
- b. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*).
- c. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)
- d. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)
- e. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Kewajiban konsumen dalam Hukum Islam yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa
- b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan
- c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul
- d. Mengikuti penyelesaian hukum terhadap sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *maslahah* bagi umat Islam. (Nurhalis, 2015)

Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk demikian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, serta menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan. (Djati Julistriarsa & John Suprihantoro, 1998)

Pengawasan dilakukan oleh pihak yang secara tegas ditunjuk untuk bertanggung jawab akan pelaksanaan pengawasan tersebut. Seperti pada PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pihak yang ditunjuk secara tegas oleh Undang-Undang tersebut adalah pemerintah yaitu menteri dan menteri teknis, masyarakat yaitu pelaku usaha dan konsumen, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Dalam proses pelaksanaan ada beberapa proses/ tahapan yang di laksanakan yaitu :

- a. Penetapan standar pelaksanaan
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan perbandingan pelaksanaan
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. (T. Hani Handoko, 2009)

Adanya pengawasan ini dimaksudkan agar terlaksananya penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

- a. Melindungi konsumen dari eksis negetif pemakain barang dan/atau jasa yang berasal dari barang dan jasa yang beredar di pasar yang tidak memenuhi persyaratan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh barang dan/jasa yang beredar di pasar
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya
- d. Melindungi industri dalam negeri
- e. Mendorong menciptakan iklim usaha yang sehat. (Kelik Wardiono, 2014)

Makanan atau Minuman Siap Saji

Makanan atau minuman siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. (Lilik Noor Yuliaty Megawati Simanjutak, 2022) Makanan atau minuman siap saji dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, di antaranya: (Emia Putri Carolina BR Surbakti, 2021)

- a. Makanan gorengan
- b. Makanan kalengan
- c. Makanan asinan
- d. Makanan daging yang di olah
- e. Makanan daging berlemak dan jeroan
- f. Olahan keju
- g. Mie instan
- h. Sajian manis beku
- i. Manisan kering

Makanan sehat harus memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Salah satu persyaratan untuk menjaga agar makanan sehat dapat dikonsumsi oleh masyarakat adalah bahwa bahan makanan yang akan diolah, terutama yang mengandung protein hewani seperti daging, susu, ikan/udang, dan telur, harus dalam keadaan baik dan segar. Demikian pula dengan bahan sayur, harus dalam keadaan segar dan tidak rusak. (Iqdhana Chantika, dkk, 2019) Untuk menjaga kebersihan dan keamanan makanan, semua kegiatan pengolahan makanan harus dilakukan dengan perlindungan agar tidak terjadi kontak langsung dengan tubuh. Perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: mencuci tangan, memakai sarung tangan, memakai

celemek dan tutup kepala, tidak merokok, tidak batuk atau bersin dihadapan makanan jajanan yang disajikan.

Higienie Sanitasi

Higienie sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

Tujuan diadakanya usaha hygiene dan sanitasi adalah untuk mencegah timbulnya penyakit dan keracunan serta gangguan kesehatan lain sebagai akibat dari adanya interaksi faktor-faktor lingkungan hidup manusia. Hygiene sendiri merupakan usaha kesehatan masyarakat yang mempelajari pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia sehingga timbul upaya mencegah timbulnya penyakit akibat pengaruh lingkungan kesehatan yang buruk dan membuat kondisin lingkungan yang baik agar terjamin kesehatanya. Dengan kata lain hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang lebih menitikberatkan pada kegiatan usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi manusia. (Yulia, 2016)

Prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman adalah pengendalian terhadap empat faktor yaitu tempat/bangunan, peralatan, orang dan bahan makanan. Terdapat 6 (enam) prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman yaitu: (Nurul Amaliyah, 2017)

- a. Pemilihan bahan makanan
- b. Penyimpanan bahan makanan
- c. Pengolahan makanan
- d. Penyimpanan makanan
- e. Pengangkutan makanan
- f. Penyajian makanan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Higienie Sanitasi Makanan Jajanan. Maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh penjamah makanan jajanan adalah:

- a. Tidak menderita penyakit mudah menular misalnya: batuk, pilek, influenza, diare, penyakit perut sejenisnya
- b. Menutup luka (Pada luka terbuka/ bisul atau luka lainnya)
- c. Menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian
- d. Memakai celemek, dan tutup kepala
- e. Mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan
- f. Menjamah makanan harus memakai alat/ perlengkapan, atau dengan alas tangan
- g. Tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut atau bagian lainnya)

h. Tidak batuk atau bersin di hadapan makanan jajanan yang disajikan dan atau tanpa menutup mulut atau hidung.

Air yang digunakan dalam penanganan makanan jajanan harus air yang memenuhi standar dan Persyaratan Hygiene Sanitasi yang berlaku bagi air bersih atau air minum. Air bersih yang digunakan untuk membuat minuman harus dimasak sampai mendidih. Semua bahan yang diolah menjadi makanan jajanan harus dalam keadaan baik mutunya, segar dan tidak busuk.

Penggunaan bahan tambahan makanan dan bahan penolong yang digunakan dalam mengolah makanan jajanan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahan makanan, serta bahan tambahan makanan dan bahan penolong makanan jajanan siap saji harus disimpan secara terpisah. Bahan makanan yang cepat rusak atau cepat membusuk harus disimpan dalam wadah terpisah.

Makanan jajanan yang disajikan harus dengan tempat/alat perlengkapan yang bersih, dan aman bagi kesehatan. Makanan jajanan yang dijajakan harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup. Pembungkus yang digunakan dan atau tutup makanan jajanan harus dalam keadaan bersih dan tidak mencemari makanan.

Makanan jajanan yang diangkut, harus dalam keadaan tertutup atau terbungkus dan dalam wadah yang bersih. Makanan jajanan yang diangkut harus dalam wadah yang terpisah dengan bahan mentah sehingga terlindung dari pencemaran. Makanan jajanan yang siap disajikan dan telah lebih dari 6 (enam) jam apabila masih dalam keadaan baik, harus diolah kembali sebelum disajikan.

Makanan jajanan yang dijajakan dengan sarana penjaja konstruksinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melindungi makanan dari pencemaran. Konstruksi sarana penjaja harus memenuhi persyaratan yaitu antara lain:

- a. Mudah dibersihkan
- b. Tersedia tempat untuk :
 - 1) Air bersih
 - 2) Penyimpanan bahan makanan
 - 3) Penyimpanan makanan jadi/siap disajikan
 - 4) Penyimpanan peralatan
 - 5) Tempat cuci (alat, tangan, bahan, makanan)
 - 6) Tempat sampah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau

masyarakat. (Sumardi Suryabrata, 1998) Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif empiris. Penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian hasil penelitian dianalisis berdasarkan ketentuan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII 2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygienic Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK dan Perspektif Hukum Islam.

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, sumber data dikelompokkan menjadi dua macam yaitu, data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari pengurus paguyuban CFD, Dinas Kesehatan, pelaku usaha, dan konsumen yang ada di CFD Tuban. Data sekunder yang diambil berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, bisa diperoleh melalui kepustakaan, buku-buku, literatur, dan bacaan yang lain untuk memperkuat penemuan atau informasi yang telah dikumpulkan melalui data primer.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. (Lexi J. Moeloeng, 2007) Wawancara adalah proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan atau informasi mengenai suatu objek yang berkaitan dengan penelitian. (Abdul Ghafur, 2022) Peneliti melakukan wawancara kepada pengurus paguyuban CFD, Dinas Kesehatan, Diskoperindag, pelaku usaha, dan konsumen. Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang berlaku, termasuk juga dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam memahami objek penelitian. (Sugiyono, 2017)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan atau minuman yang ada di *Car Free Day* GOR Tuban. Penyajian data merupakan kegiatan mengelompokkan, menyusun, atau membuat pola dari hasil data yang diperoleh berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, sehingga akan memudahkan dan memahami apa yang telah terjadi. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan hasil dari penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok dengan data yang telah disajikan melalui informasi tersebut.

PEMBAHASAN

Sejarah singkat *car free day* Tuban

Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Car Free Day* Kabupaten Tuban bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. *Car Free Day* Tuban di dirikan pada tahun 2014, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memberikan ruang publik yang sehat, nyaman, dan bebas dari kendaraan bermotor bagi masyarakat serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang baik dan mengurangi polusi udara, maka diadakan *Car Free Day* sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

Car Free Day di laksanakan setiap hari minggu di jalan Sunan Kalijaga pada pukul 06.00 sampai 10.00 WIB. Menurut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tujuan *Car Free Day* Tuban yaitu :

- a. Penurunan beban pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor
- b. Memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi yang sehat
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pencemaran udara melalui pengurangan pemakaian kendaraan bermotor.
- d. Membantu meningkatkan usaha dan perekonomian warga tuban

Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan atau Minuman Siap Saji di Paguyuban Pedagang Car Free Day Tuban Menurut Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/ 2003 Tentang Pedoman Persyaratan Higienie Sanitasi Makanan Jajanan

Pengetahuan mengenai pengaruh higienie makanan sangatlah penting. proses pengolahan makanan dapat berdampak pada kualitas makanan yang akan dihasilkan. Jika pengolahan makanan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan diiringi dengan penerapan hygiene yang baik, maka akan menghasilkan makanan yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika hygiene diabaikan, maka makanan yang dihasilkan dapat menjadi buruk dan tidak sehat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Makanan Jajanan, terdapat beberapa aspek yang diatur dalam penanganan makanan jajanan, yaitu penjamah makanan, peralatan, air, bahan makanan, bahan tambahan makanan, penyajian dan sarana penjaja. Beberapa aspek tersebut sangat mempengaruhi kualitas makanan.

Penjamah makanan di CFD Tuban masih banyak yang tidak menggunakan sarung tangan dan penutup kepala. Hal ini dapat menyebabkan makanan terkena cemaran fisik, seperti rambut, maupun kuman dari tangan. Penjamah makanan tidak menyediakan tempat cuci

tangan dan tidak menutup makanan saat disajikan sehingga vektor seperti lalat mempunyai kemungkinan untuk menularkan penyakit. Alasan mereka tidak menggunakan sarung tangan atau penutup kepala karena tidak nyaman dan mengganggu saat bekerja.

Kebersihan peralatan yang digunakan untuk menjual makanan adalah hal yang sangat penting dalam menjaga hygiene dan sanitasi makanan, karena peralatan yang tidak bersih dapat berdampak pada kebersihan dan kualitas makanan yang dihasilkan. (Okta Setyawati, 2015) Sebagian besar pedagang di *car free day* telah menggunakan peralatan makanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmenkes Nomor 942 tahun 2003, menggunakan alat makan sekali pakai baik dari bahan alami seperti daun pisang maupun dari bahan buatan yang memiliki logo tara pangan (*food grade*), Sebagai contoh, pedagang nasi pecel menggunakan daun pisang atau kertas minyak sebagai alas makanannya yang hanya digunakan sekali pakai, dan pedagang lain menggunakan wadah makanan seperti paper box atau bahan serupa yang juga digunakan hanya sekali pakai. Sebelum menyajikan makanan, penjamah makanan membersihkan wadah makanan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk memastikan kebersihan wadah tersebut.

Pada acara *car free day* Tuban banyak pedagang yang menutup makanannya hanya dengan selembar kertas atau plastik saja, seperti penjual gorengan dan kue yang hanya menutup produk mereka dengan selembar kertas atau plastik, atau bahkan sama sekali tidak menutupnya. Alasan yang mereka berikan adalah karena khawatir pembeli tidak akan menyadari produk yang mereka jual jika ditutup dengan rapat.

Untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan sanitasi makanan jajanan, dapat dilakukan dengan menetapkan lokasi khusus sebagai pusat pedagang makanan jajanan. Sentra yang memenuhi syarat sebagai pusat pedagang makanan jajanan harus jauh dari sumber pencemaran atau potensi pencemaran makanan jajanan seperti tempat pembuangan sampah terbuka, pengolahan limbah, rumah potong hewan, dan jalan dengan lalu lintas yang ramai dan cepat. Selain itu, pusat pedagang makanan jajanan harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang mencakup air bersih, tempat sampah, saluran pembuangan air limbah, toilet dan pembuangan tinja, serta fasilitas pengendalian hama seperti lalat dan tikus. (Defiyanti Pratiwi, 2012) Di *car free day* Tuban disediakan tempat sampah di tengah-tengah sepanjang jalan sunan kalijaga dan ada tempat sampah pribadi di setiap penjaja yang menggunakan tempat sampah tidak tertutup. Penjaja menggunakan tempat sampah pribadi dari kresek plastik yang diletakkan di samping tempat jualan atau bahkan dicentelkan pada gerobak dagangan mereka. Alasan penggunaan plastik kresek ini adalah karena harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan jenis tempat sampah lainnya. Selain itu, pedagang dapat dengan mudah mengganti kresek tersebut setelah

penuh dan langsung membuangnya, sehingga menghemat waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk membersihkan tempat sampah, dengan menempatkan tempat sampah di dekat gerobak dagangan mereka, pedagang dapat memastikan bahwa sampah yang dihasilkan oleh usaha dagang mereka dapat langsung dibuang ke tempat yang tepat tanpa harus pergi jauh atau mengganggu pelanggan mereka.

Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan atau Minuman Siap Saji di Paguyuban Pedagang Car Free Day Tuban Menurut Perspektif Hukum Islam

Pedagang makanan dan minuman yang ada di CFD Tuban cenderung tidak mencuci tangan sebelum berjualan. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas tempat cuci tangan yang tersedia di lokasi penjualan. pedagang hanya membersihkan tangan menggunakan serbet. pedagang yang menyentuh makanan secara langsung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu akan mengakibatkan bakteri dengan mudah berpindah dari tangan ke makanan tersebut.

Menurut ajaran agama Islam, mencuci tangan bukan hanya penting untuk menjaga kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari keimanan. Seorang muslim diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan dalam segala hal yang dilakukannya, dan menghindari kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi oleh kotoran atau najis. Allah SWT sangat mencintai kebersihan, maka seseorang yang selalu menjaga kebersihan juga akan dicintai oleh Allah. Surat At-Taubah dalam Al-Quran juga memuat ayat-ayat yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bentuk ketundukan kepada Allah.

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Artinya: “ Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang-orang yang membersihkan diri.” (Q.S. At-Taubah (9) ayat 108).

Di CFD Tuban masih banyak pedagang yang tidak menggunakan celemek, tidak menggunakan sarung tangan dan penutup kepala. Hal ini dapat menyebabkan makanan terkena cecaran fisik, seperti rambut, maupun kuman dari tangan. Alasan mereka tidak menggunakan sarung tangan atau penutup kepala karena tidak nyaman dan mengganggu saat bekerja. Namun, fakta bahwa kebanyakan pedagang di CFD ini menggunakan kerudung, membuat mereka merasa tidak perlu menggunakan penutup kepala. Pakaian kerja yang bersih akan menjamin sanitasi dan hygiene makanan terlindung dari kotoran dan debu yang

melekat pada pakaian yang dapat menyebabkan pencemaran ke makanan. Kebersihan pakaian merupakan salah satu aspek untuk mendukung personal *hygiene*. (Febria Agustina, 2010)

Agama Islam mengajarkan bahwa selain menjaga kebersihan diri, kebersihan segala hal yang terkait dengan diri manusia juga sangat penting. Hal ini tercantum dalam surah Al-Mudassir:

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

Artinya: “ Pakaianmu bersinkahlah” (Q.S. Al-Mudassir (74) ayat (4)

Bukan hanya didalam kesehatan saja yang mengharuskan seseorang memiliki kebersihan pakaian namun didalam agama juga perlu memperhatikan kebersihan pakaian. Jelas adanya bahwa di dalam Al-Quran diterangkan bagaimana ummatnya dalam berpakaian, dengan berpakaian yang sopan dan terhindar dari kotoran dan najis. Saat melakukan ibadah umatnya diperintahkan dalam keadaan bersih dan terhindar dari najis. Dan dalam kesehatan juga berpakaian yang bersih termasuk dalam perilaku hidup bersih sehat, dimana individu tersebut menjaga kebersihan badan dan pakaiannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan, pedagang telah melakukan proses pengolahan yang baik karena telah mencuci bahan baku sebelum diolah dan menggunakan bahan yang segar dan tidak kadaluarsa. Jika makanan terkontaminasi, maka makanan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan yang akan merugikan konsumen, seperti yang dialami salah satu konsumen yang ada di *car free day*. Konsumen tersebut mengalami kerugian karena memakan salah satu jenis makanan yang dijual di acara *car free day* yang kurang higienis, sehingga mengakibatkan konsumen muntah-muntah setelah mengkonsumsinya. Sesuai dengan hak-hak konsumen dalam hukum Islam, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk. (Nurhalis, 2015) Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-dharar al-badaniyah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. (Jaya Miharja, 2006)

Kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak di benarkan, oleh karena itu pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan ganti rugi karena tipu daya (*Dhama>n al-Maghru>r*) karena perbuatannya itu. Namun konsumen yang mengalami kerugian tersebut lebih memilih diam tidak memperjuangkan hak-haknya dan mengatasi kerugian tersebut dengan

Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

biaya sendiri tanpa meminta ganti rugi ke pelaku usaha yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Makanan atau Minuman Siap Saji di Paguyuban Car Free Day Tuban

Pengawasan terkait makanan dan minuman merupakan bagian terpenting dalam segala aktivitas kesehatan masyarakat karena mengingat adanya kemungkinan penyakit-penyakit akibat makanan dan minuman. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Pengawasan makanan dan minuman meliputi kegiatan usaha yang ditujukan kepada kebersihan dan kemurnian makanan dan minuman agar tidak menimbulkan penyakit. Kemurnian disini dimaksud murni menurut penglihatan maupun rasa. Pengelolaan makanan dan minuman yang dibuat di berbagai tempat seperti restoran, warung makan, jasa catering, industri rumah tangga pangan, pusat jajanan dan tempat pengolahan makanan lainnya. (Atika Safitri, 2017)

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban berpedoman pada KEPMENKES Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Higien Sanitasi Makanan Jajanan. Pengawasan berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa pangan jajanan siap saji yang beredar telah dan secara terus menerus melaksanakan syarat Hygiene sanitasi yang laik sehat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dinas Kesehatan Tuban melakukan pengawasan melalui stikerisasi. Dinkes selaku pihak yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pangan jajanan siap saji, menilai apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Setelah dinilai memenuhi syarat Dinkes Tuban akan memberikan stikerisasi. Masa berlaku stiker yaitu 2 tahun. Mekanisme pemberian stikerisasi:

1. Pendataan pedagang oleh Dinas Kesehatan dan pengurus paguyuban pedagang CFD
2. Memberikan penyuluhan keamanan pangan siap saji bagi pengelola dan penjamah dengan cara:
 - a. Pengelola dan penjamah pangan dikumpulkan di salah satu tempat dan diberikan penyuluhan keamanan pangan siap saji
 - b. Pengelola dan penjamah pangan yang sudah mengikuti penyuluhan dapat diberikan sertifikat
3. Dinas Kesehatan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan dengan membawa formulir yang diambil dari pedoman inspeksi kesehatan lingkungan
4. Pemeriksaan sampel dengan rapid test atau pemeriksaan

laboratorium

5. Setelah inspeksi kesehatan memenuhi syarat maka Dinas Kesehatan dapat memberikan label pengawasan/pembinaan yang ditempelkan di tempat yang terlihat pengunjung
6. Label pengawasan/ pembinaan berlaku untuk satu lokasi tempat pengelolaan pangan.

Label pengawasan/pembinaan tercantum:

- a. Ukuran Label 10 cm x 17 cm
- b. Logo dinas kesehatan/ otoritas kesehatan bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara ada di sebelah kiri atas
- c. Logo GERMAS ada di sebelah kanan atas
- d. Nomor dan tanggal pemeriksaan ada di sebelah kiri bawah
- e. Tanda tangan pejabat berwenang ada di sebelah kanan bawah
- f. Masa berlaku maksimal 2 tahun
- g. Tulisan memenuhi syarat

Standar higienie sanitasi makanan jajanan harus terpenuhi dengan memperoleh nilai minimal 80 dalam inspeksi kesehatan lingkungan. Jika nilai inspeksi kurang dari 80, maka Dinas Kesehatan akan memberikan pembinaan lagi sehingga pedagang bisa memperoleh stiker sertifikasi. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun dan tidak merata keseluruh pedagang yang ada di CFD Tuban. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sertifikasi berfungsi sebagai upaya menerapkan standardisasi. (Gerald Alvino Fugen, Evelyne Juanda Tanurahardja, 2020) Label pengawasan/pembinaan adalah tanda/bukti yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap tempat pengelolaan pangan yang dipersyaratkan dan telah memenuhi persyaratan pangan olahan siap saji.

Dinas Kesehatan telah menerbitkan 30 stiker sertifikasi untuk pedagang di CFD Tuban, dari total 220 pedagang makanan dan minuman yang ada di sana. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di CFD, Dinas Kesehatan harus mengikuti anggaran dan melakukannya secara bertahap.

Pedagang yang melanggar standar higienie sanitasi akan mendapatkan teguran lisan dan tertulis dari Dinas Kesehatan. Tujuan dari teguran tertulis ini untuk memastikan bahwa pedagang mematuhi standar higienie sanitasi yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan konsumen dan mencegah penyebaran penyakit. Dinas kesehatan melakukan teguran lisan pada pedagang yang melanggar dan kurang memenuhi persyaratan higienie sanitasi secara langsung pada saat melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, pedagang yang melanggar dan kurang memenuhi persyaratan higienie sanitasi akan mendapatkan pembinaan lagi dari dinas kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan atau minuman siap saji di CFD Tuban, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan konsumen terhadap makanan atau minuman siap saji di CFD Tuban belum berjalan maksimal. Penjaja telah memahami higienie sanitasi pangan jajanan dengan baik dan memperhatikan kaidah-kaidah higienie sanitasi sesuai persyaratan kesehatan. Namun, dalam prakteknya terlihat dari hasil pengamatan bahwa penjaja makanan atau minuman cenderung mengabaikan dan tidak mematuhi pedoman persyaratan higienie sanitasi makanan jajanan.
2. Banyak pedagang di CFD Tuban yang tidak memperhatikan prinsip higienie sanitasi dalam Syariat Islam, sehingga bisa menyebabkan kemudhoratan seperti yang terjadi dalam kasus tersebut. Penjaja makanan sebenarnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha dalam Islam, namun mereka mengabaikannya. Di sisi lain, konsumen yang mengalami kerugian memilih untuk diam karena merasa musibah yang di alami tidak terlalu berat. Baik pelaku usaha maupun konsumennya sama-sama mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Bentuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap makanan atau minuman siap saji di CFD Tuban belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik karena pemerintah kabupaten Tuban belum optimal terkait pengawasan dan hanya menerapkan sanksi teguran lisan dan tertulis, dan pelaksanaan pembinaan tidak rutin karena terkendala anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Febria Rindit Pambayun, Fatmalina Febry. (2010). Higienie dan Sanitasi pada Pedagang Makanan Jajanan Tradisional di Lingkungan Sekolah Dasar di Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1, No.1.
- Amaliyah, Nurul. (2017). *Penyehatan Makanan dan Minuman*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chantika Iqdhana, Dadiék Sumardianto dan Ningsih Dewi Sumaningrum. (2019). Higienie Penjamah dan Sanitasi Pengelolaan Makanan di Instansi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri." *Jurnal Preventia*, Vol.1, No.1
- Ferry, Marta, Tohirin dan Susmiati. (2019). *Sanitasi Tempat-Tempat Umum di Lengkapi dengan Prespektif Islam*, Jakarta: Uhamka Press.
- Fugen, Gerald Alvino, Evelyne Juanda Tanurahardja. (2020). Peran Pembinaan dan Pengawasan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Dalam Mendorong Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran untuk Memenuhi Tanggung Jawab atas Persyaratan Higienie Sanitasi Menurut Peraturan yang Berlaku. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol.5, No.2.

Sisi Sholekhatin Ni'mah, Galuh Widtya Qomaro : Perlindungan Konsumen Makanan Siap Saji Menurut Perspektif Hukum Islam dan Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Juncto UUPK

- Gafur Abdul. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Media sains Indonesia.
- Handoko T. Hani. (2009). *Management*, Yogyakarta: BPFE.
- Julistriarsa Djati dan John Suprihantoro. (1998). *Manajemen Umum*, Yogyakarta:BPFE
- Miharja, Jaya. (2006). Konsep Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, NO.2.
- Moeloeng, Lexi J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet xxiii, Bandung: Raja Rosdakarya.
- Muhammad dan Alimin. (2018). *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.3, No.9.
- Pratiwi, Defiyanti. (2012). Hygiene Sanitasi Pedagang Kue Dan Keberadaan Escherichia coli Pada Makanan Jajanan Kue Cucur Di Wilayah Pasar Tradisional Desa Kaliyoso Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Tahun 2012", *Public Health Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Safitri, Atika. (2017). Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman oleh Dinas Kesehatan di Kota Pekanbaru.", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol.4, No.2.
- Setyawanti, Okta, Sri Wahyu Andayani. (2015). Higiene Dan Sanitasi Jajan Pasar Di Pasar Kotagede Yogyakarta." *Jurnal Keluarga*, Vol.1, No.2.
- Simanjutak, Lilik Noor Yulianti Megawati. (2022). *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, Bogor: PT IPB Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-23, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono Bambang. (2006). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, Emia Putri Carolina BR. (2021). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Tindakan Konsumsi Makanan Cepat Saji (Fast Food) Pada Remaja." *Politeknik Kesehatan KEPMENKES Medan*.
- Suryabrata Sumardi. (1998). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wardiono Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Yulia. (2016). Higiene Sanitasi Makanan, Minuman Dan Sarana Sanitasi Terhadap Angka Kuman Peralatan Makan Dan Minum Pada Kantin. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, Vol 2, No.1.